

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Junaidi, 2012, *Porno! Feminisme, Seksualitas, Dan Pornografi Di Media*, Grasindo, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Adami Chazawi, 2001, *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abu Abdurrahman Nusantari, 2005, *Menepis Godaan Pornografi*, Darul Falah, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Penyerahan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.
- Achmad Ali, 1999, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta.
- Banda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Cyber Crime Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2014, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwi Haryadi, 2013, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Lima, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H. Susyanto, 2018. *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo.
- Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Raja Grafindo Persada, Depok.

- Ismu Gunadi Widodo, 2006, *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi Memahami Wewenang Diskresi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi/Aksi*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lukman Hakim, 2020, *Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB.
- Muhammad Iqbal, Suhendar, Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang Selatan.
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 1990, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad Nasir, 2005, *Hukum Acara Perdata, Cet. II*, Djambatan, Jakarta.
- M. H. Tirtaamidjaja, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. I*, Liberty, Yogyakarta.

Tina Asmarawati, 2015, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung.

B. JURNAL

Dedi Darwis, Eka Shintya Pratiwi dan A. Ferico Octaviansyah Pasaribu, "*Penerapan Algoritma SVM Untuk Analisis Sentimen Pada Data Twitter Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*", Jurnal Ilmiah Edutic, Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia, Vol. 7, Nomor 1 November 2020.

Eka Nugraha Putra, "*Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn*", Jurnal Cakrawala Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Vol. 6, Nomor 1 Juni 2015.

Fauzi Solihin, Siti Awaliyah dan A. Muid Aris Shofa, "*Pemanfaatan Twitter Sebagai Media Penyebaran Informasi Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika*", Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang, Vol. 13 No. 1 Juni 2021.

Go Lisanawati, "*Cyber Child Sexual Exploitation Dalam Perspektif Perlindungan Atas Kejahatan Siber*", Jurnal Pandecta, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 8, Nomor 1 Januari 2013.

Harol Augusto Manurung, Nuswantoro Dwi Warno dan Joko Setiyono, "*Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional*", Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, Nomor 3 Juni 2016.

Hwian Christanto, "*Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Pornografi Melalui Internet Dalam Bingkai Kebijakan Hukum Pidana Di Era Globalisasi*", Penelitian Mandiri, Universitas Surabaya, November 2013.

Kadek Jovan Mitha Sanjaya, "*Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial*", Jurnal Kertha Desa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 9, Nomor 11 Januari 2022.

Suci Flambonita, Vera Novianti dan Artha Febriansyah, "*Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik Bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum*", Jurnal Abdidas, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 2, Nomor 3 Juni 2021.

Wahyu Agus Winarto, “Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, Jurnal Universitas Jember, Vol. 10, Nomor 1 Februari 2015.

Yayat D. Hadiyat, “Pola Komunikasi Prostitusi Daring Di Twitter”, Jurnal PIKOM, Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika Makassar, Vol. 18, Nomor 2 Desember 2017.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.